

INTEGRASI KONSEP KEBENCANAAN DALAM IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 DI SEKOLAH DASAR

Almukarramah

Universitas Serambi Mekkah
Email : almukarramah@serambimekkah.ac.id

Fadhillah

Universitas Serambi Mekkah
Email : fadhillah@serambimekkah.ac.id

Ajat Sudrajat

Universitas Negeri Jakarta
Email : ajatpgsd@yahoo.com

Abstract: A disaster is an event that has a large impact on human populations, both natural disasters, non-natural disasters, and social disasters. Permendikbud number 33 of 2019 concerning the Implementation of the Disaster Safe Education Unit Program to prepare disaster response education units. Through this paper we will study through the integration of the concept of disaster in the implementation of the 2013 curriculum in elementary schools, starting with how the paradigm of disaster management in Indonesia, in the context of the elementary school curriculum, thematic learning from the 2013 curriculum that can be integrated into the concept of disaster. The method used is a literature review of legislation relating to the disaster, research results, modules, books, practical manuals. Furthermore, it will be adapted through content analysis related to the 2013 curriculum and the concept of disaster. The results show that there was a change in the paradigm of disaster management before and after the issuance of Law Number 24 of 2007 concerning Disaster Management. Next, a theme from each class related to the potential to be developed for local wisdom based disaster materials, including Class I, is the theme of natural events. Class II, the theme of Safety at home and on the road. Class III, the theme of climate change. Class IV, theme Caring for the environment. Class V, our friend's Environment theme. Class VI, my Earth theme.

Keyword : *Integration, Disaster Concepts, Elementary Thematic, 2013 Curriculum.*

Abstrak : Bencana adalah suatu peristiwa yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia, baik bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Permendikbud nomor 33 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana untuk menyiapkan satuan pendidikan yang tanggap bencana. Melalui makalah ini akan kajian melalui integrasi konsep kebencanaan dalam implementasi kurikulum 2013 di Sekolah Dasar dimulai dengan bagaimana paradigma penanggulangan bencana di Indonesia, dalam konteks kurikulum Sekolah Dasar, pembelajaran tematik apa saja dari kurikulum 2013 yang dapat diintegrasikan kedalam konsep kebencanaan. Metode yang digunakan yaitu literature review dari perundang-undangan yang berkaitan dengan kebencanaan, hasil penelitian, modul, buku, buku panduan praktis. Selanjutnya disadur melalui analisis konten yang berhubungan dengan kurikulum 2013 dan konsep bencana.

Hasilnya menunjukkan bahwa terjadi perubahan paradigma penanggulangan bencana sebelum dan sesudah terbit Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Selanjutnya ditetapkan satu tema dari masing-masing kelas yang berkaitan dengan berpotensi dikembangkan untuk materi kebencanaan berbasis kearifan lokal, diantaranya Kelas I, tema peristiwa alam. Kelas II, tema Keselamatan dirumah dan di perjalanan. Kelas III, tema Perubahan cuaca. Kelas IV, tema Peduli terhadap lingkungan hidup. Kelas V, tema Lingkungan sahabat kita. Kelas VI, tema Bumiku.

Kata Kunci : Integrasi, Konsep Kebencanaan, Tematik SD, Kurikulum 2013

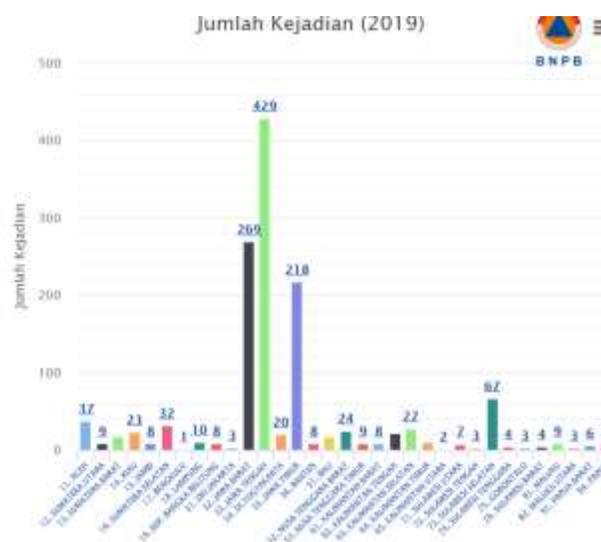
PENDAHULUAN

Bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Undang-Undang nomor 4 Tahun 2007 mengungkapkan tiga karakteristik bencana, yaitu a) **Bencana Alam**: Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain: Gempa bumi, Tsunami, Gunung meletus, Banjir, Kekeringan, Angin topan, dan Tanah longsor. b) **Bencana Non Alam**: Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam, antara lain: Gagal teknologi, Gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. c) **Bencana Sosial**: Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat dan teror.

Bencana adalah suatu peristiwa yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Bencana tersebut dapat mengakibatkan kerusakan pada bidang ekonomi, sosial dan lingkungan, timbulnya korban jiwa manusia, kerugian harta benda, dan mengakibatkan dampak psikologis.

Menurut Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) dari Badan Penanggulangan Bencana (BNPB), sebaran kejadian bencana di wilayah Indonesia tahun 2019, didominasi provinsi Jawa Tengah 429 kejadian, Jawa Barat sebanyak 269, Jawa Timur sebanyak 218, Sulawesi Selatan sebanyak 67, dan Aceh 37 sebanyak 37 kejadian. Meskipun demikian hampir seluruh wilayah Indonesia mempunyai jumlah kejadian bencana (gambar 1).



Gambar 1. Jumlah Kejadian Bencana di Wilayah Indonesia. (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2019)

Berdasarkan data dari DIBI, 2019, ditinjau dari karakteristik jenis bencana dari tahun 2000 sampai tahun 2019, jumlah kejadian yang masuk kategori bencana alam, bencana banjir mendapatkan jumlah kejadian tertinggi sebanyak 9053 kejadian, puting beliung 8318 kejadian, tanah longsor 5130 kejadian, kekeringan 2000 kejadian, kebakaran hutan 973 kejadian, gelombang pasang/abrasi 322 kejadian, gempa bumi 266 kejadian, letusan gunung berapi 144 kejadian, tsunami 14 kejadian dan gempa bumi dan tsunami sebanyak 2 kejadian.

Selanjutnya jumlah kejadian bencana non alam, kebakaran memiliki jumlah kejadian tertinggi sebanyak 2402 kejadian, kecelakaan transportasi 332 kejadian, kejadian luar biasa 90 kejadian, dan dampak industri sebanyak 31 kejadian. Sedangkan bencana sosial, konflik dan kerusuhan sosial mencapai 107 kejadian, aksi teror/sabotase sebanyak 29 kejadian.

Jumlah kejadian bencana tersebut, memiliki dampak bagi populasi masyarakat Indonesia. Bencana tersebut telah mengakibatkan kerusakan pada bidang ekonomi, sosial, lingkungan, timbulnya korban jiwa manusia, kerugian harta benda, dan mengakibatkan dampak psikologis.

Dampak dari bencana tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat

tentang bencana, sehingga tidak adanya kesiapsiagaan dan pencegahan dari masyarakat terhadap bencana, termasuk kesiapsiagaan tenaga profesional dalam melindungi diri dan masyarakat menghadapi dampak bencana (Gowing, Walker, Elmer, & Cummings, 2017).

Pemerintah telah menyusun beberapa langkah-langkah strategis untuk menurunkan resiko bencana. Hal tersebut tidaklah cukup tanpa adanya dukungan dari masyarakat. Dukungan masyarakat akan terwujud jika mereka memahami tentang kebencanaan sehingga timbul sikap pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang terjadi. Pemahaman tentang kebencanaan tersebut dapat mudah diterima apabila diberikan secara kontekstual atau berbasis kearifan lokal. Dibutuhkan pendekatan partisipatif dari berbagai pihak untuk membangun kesadaran tanggap bencana (Khan, 2008).

Meskipun secara umum mayoritas mengetahui dampak bencana yang dapat mempengaruhi mereka, memiliki pemahaman tentang bahaya potensial yang dapat ditimbulkan oleh suatu peristiwa bencana dalam keadaan darurat tetapi kebanyakan masyarakat belum secara proaktif mengambil tindakan untuk kesiapan menghadapi bencana (Rañeses, Chang-Richards, Richards, & Bubb, 2018) dimana

pengetahuan tentang kesiapsiagaan bencana dan mitigasi bencana sangat penting (Sinha, Pal, Kasar, Tiwari, & Sharma, 2008) untuk dipersiapkan dan ditingkatkan pemahaman.

Salah satu tempat yang dapat memberikan pemahaman dan mempersiapkan masyarakat menghadapi bencana secara terintegrasi adalah lembaga pendidikan. Sekolah merupakan salah satu lembaga pendidikan yang menjadi acuan masyarakat belajar tentang pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.

Pemerintah telah menetapkan beberapa kebijakan yang mendukung perihal tersebut seperti Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008 penyelenggaraan penanggulangan bencana, Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana, Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2008 tentang peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dalam penanggulangan bencana, Perpres nomor 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, surat edaran Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 70a /MPN/SE/2010 tentang pengarusutamaan Pengurangan Resiko Bencana di Sekolah serta Peraturan

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor 4 tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana. Serta Permendikbud nomor 33 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (Program SPAB).

Adapun tujuan penyelenggaraan program SPAB adalah untuk; a) meningkatkan kemampuan sumber daya di Satuan Pendidikan dalam menanggulangi dan mengurangi Risiko Bencana; b) meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Satuan Pendidikan agar aman terhadap Bencana; c) memberikan perlindungan dan keselamatan kepada Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dari dampak Bencana di Satuan Pendidikan; d) memastikan keberlangsungan layanan pendidikan pada Satuan Pendidikan yang terdampak Bencana; e) memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik Risiko Bencana dan kebutuhan Satuan Pendidikan; f) memulihkan dampak Bencana di Satuan Pendidikan; dan g) membangun kemandirian Satuan Pendidikan dalam menjalankan Program SPAB.

Untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan program SPAB di satuan pendidikan adalah dengan cara

mengintegrasikan konsep kebencanaan melalui program SPAB kedalam kurikulum di satuan pendidikan.

Telah ada penelitian terdahulu yang pada bidang pengurangan risiko bencana yang difokuskan pada pendidikan, baik kesiapsiagaan bencana di Universitas (Tkachuck, Schulenberg, & Lair, 2018) ataupun kesiapsiagaan pendidikan bencana di sekolah, anak-anak dan remaja, berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan untuk melakukan penelitian lanjutan yang menfokuskan pada pengembangan strategi untuk memaksimalkan potensi peran pendidikan, sekolah, anak-anak dan kaum muda. Hal tersebut diduga akan memiliki hasil positif yang kuat untuk masyarakat yang terkena dampak bencana (Tatebe & Mutch, 2015).

Berdasarkan hal tersebut, maka melalui penelitian ini akan dilakukan kajian melalui integrasi konsep kebencanaan dalam implementasi kurikulum 2013 di Sekolah Dasar. Sekolah Dasar merupakan sekolah formal yang memiliki tingkat kerentanan terhadap bencana lebih tinggi dibandingkan dengan sekolah di jenjang di atasnya, oleh karena dibutuhkan suatu kajian terkait dengan hal tersebut, dimulai dengan bagaimana paradigma penanggulangan bencana di Indonesia?, dalam konteks

kurikulum Sekolah Dasar, pembelajaran tematik apa saja dari kurikulum 2013 yang dapat diintegrasikan kedalam konsep kebencanaan?

METODE

Metode yang digunakan yaitu literature review dari perundang-undangan yang berkaitan dengan kebencanaan, hasil penelitian, modul, buku, buku panduan praktis. Selanjutnya disadur melalui analisis konten yang berhubungan dengan kurikulum 2013 dan konsep bencana, sehingga dapat memberikan gambaran terkait dengan integrasi konsep kebencanaan dalam implementasi kurikulum 2013 di Sekolah Dasar.

PARADIGMA PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA

Indonesia merupakan negara kepulauan dimana secara geografis, geologis, hidrologis dan demografis sangat berpotensi terhadap bencana, oleh karena itu Indonesia juga sering disebut sebagai “supermarket” bencana. Secara geografis, Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempengan bumi, yaitu Eurasia, Pasifik, dan Indo-Australia sehingga posisinya mudah bergeser dan sangat rawan terhadap bencana gempa bumi, tsunami dan longsor. Selain

itu, Indonesia juga terletak di daerah “ring of fire” dimana 127 gunung api aktif berderet dari barat ke timur. Secara cuaca, Indonesia mengalami fluktuasi iklim dinamis yang menyebabkan Indonesia rawan bencana alam kebumihan seperti badai, topan, siklon tropis, banjir.

Selain faktor alam, kompleksitas kondisi masyarakat Indonesia dari berbagai sisi, seperti ekonomi, kepadatan penduduk, sumber daya manusia yang rendah, jaminan kesehatan rendah, telah menambah tingginya kerentanan terhadap peristiwa bencana alam.

Sepanjang kurun waktu 1900-2019 Indonesia mengalami berbagai kejadian bencana alam, non alam, dan social dengan jumlah kejadian yang beragam. Bencana alam; banjir sebanyak 9.167 kejadian, puting beliung sebanyak 6.354 kejadian, tanah longsor 5.157 kejadian, kekeringan 2.000 kejadian, kebakaran hutan dan lahan 973 kejaidan, gelombang pasang 322 kejadian, gempa bumi, 303, letusan gunung api 161, tsunami 23, dan gempa bumi dan tsunami 2 kejaidan. Untuk bencana non alam kebakaran mendominasi dengan 2.531 kejadian, dan bencana sosial berupa konflik atau kerusuhan sosial yang mendominasi dengan jumlah 113 kejadian (DIBI, 2019)

Selama ini masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa bencana

merupakan sesuatu yang berasal di luar kendali manusia bisa disebut sebagai sebuah takdir yang telah ditetapkan. Menurut pandangan ini, manusia hanya dapat pasrah karena bencana datang secara tiba-tiba, tidak dapat diprediksi datangnya, tidak dapat dihindari maupun dikendalikan. Akibatnya adalah tidak ada tindakan penanggulangan untuk mengurangi risiko bencana tersebut dan masyarakat dianggap sebagai korban yang berhak untuk dibantu dan di santuni.

Selanjutnya bencana dari sudut pandang Ilmu Pengetahuan Alam, dimana bencana merupakan gejala alam atau kekuatan alam yang luar biasa yang dapat menyebabkan kerusakan dan membahayakan kehidupan manusia, dimana faktor manusia tidak diperhitungkan penyebab terjadi bencana. Bencana dapat diprediksi maka manusia dapat melakukan upaya pencegahan, kesiapsiagaan sehingga tingkat kerusakan bencana dapat minimalisir.

Sejalan dengan berkembangnya ilmu-ilmu alam murni dan keteknikan, serta lahirnya ilmu-ilmu terapan, maka maka bencana dipandang sebagai akibat dari kurangnya infrastruktur dan prasarana yang memadai. Disini faktor manusia manusia sudah diperhitungkan sebagai pembangun infrastruktur dan bangunan untuk

mengurangi dampak kerusakan dari bencana.

Selain itu, ada juga yang berpandangan bahwa bencana tergantung dari sisi manusianya. Bencana disebabkan oleh ketidakmampuan manusia dalam melakukan kesiapsiagaan dan merespon terhadap ancaman alam. Kerentanan masyarakat, baik sosial, ekonomi, dan politik, menjadi kunci bagi besar kecilnya bencana. Perlu dilakukan penguatan masyarakat untk mengurangi dampak yang terjadi.

Meskipun demikian, idealnya jika berbicara tentang bencana maka ada sebuah fenomena kompleks antara gejala alam dan perilaku manusia (pandangan holistik). Pendekatan ini menekankan bahwa bahaya, kerentanan dan risiko bencana perlu diimbangi dengan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bahaya dan risiko bencana.

Diantara ke lima pandangan diatas, maka pandangan holistik dianggap yang paling mampu menjawab tantangan pennggulan dan pengurangan risiko bencana yang efektif. Bencana merupakan fenomena yang kompleks, membutuhkan manusia baik ahli ilmu alam, terapan, sosial, politik, ekonomi dan lainnya dapat berperan aktif dalam pengurangan risiko bencana

dengan sejumlah kegiatan penanggulangan bencana baik dilakukan dilakukan sebelum, saat, dan setelah bencana.

Jika ditelisik dari sudut pandang waktu, kejadian Indian Ocean Tsunami pada tahun 2004 (tsunami Aceh) telah dijadikan sebuah titik tolak perubahan paradigma penanggulangan bencana, dimana selama kurun waktu 2004 – 2009 dimulai dengan membangun komitmen bangsa dalam penanggulangan bencana. Aspek legislasi bencana telah lahir dari Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008 penyelenggaraan penanggulangan bencana, Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana, Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2008 tentang peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dalam penanggulangan bencana, Perpres nomor 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Aspek kelembagaan dibentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Planas PRB. Terjadi pergeseran paradigma penanggulangan bencana sebalum dan setelah ditetapkan Undang-Undang nomor 24 tahun 2007, dimana sebelumnya pra

Bencana kurang diperhatikan, mengutamakan Penanganan Darurat, manajemen PB masih sectoral, landasan hukum yang masih kurang, belum didukung perencanaan PB dan anggaran, pemahaman dan kemampuan pelaku PB yang terbatas menjadi memperhatikan upaya Pra Bencana, penanganan darurat, dan pemulihan, manajemen PB yang terkoordinasi, landasan hukum penyelenggaraan PB yang cukup kuat, mendorong dokumen perencanaan PB dan anggaran, memperhatikan penguatan kapasitas PB yang dibutuhkan.

Selanjutnya pada tahun 2010 – 2014 disebut sebagai masa laboratorium bencana, dimana sistem penanggulangan bencana sudah diletakkan sebagai dasar. Pada tahun 2015 – 2019 ditingkatkan efektifitas penanggulangan bencana, dimana disebut sebagai pusat pengetahuan bencana dengan berbagai cara salah satunya dengan melahirkan Permendikbud nomor 33 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana, sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan dampak Bencana di Satuan Pendidikan.

ANALISIS PEMBELAJARAN TEMATIK DI SEKOLAH DASAR

Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Berdasarkan tematik tersebut dapat dikembangkan berbagai informasi sesuai dengan konteks dan kebutuhan siswa. Salah satunya adalah pengembangan konsep kebencanaan yang diintegrasikan dengan tema pembelajaran yang sesuai.

Hasil analisis pembelajaran tematik yang dihubungkan dengan konsep kebencanaan maka melalui penelitian ini direkomendasikan beberapa tema yang sangat cocok untuk dikembangkan melalui materi konsep kebencanaan berbasis kearifan lokal di Sekolah Dasar, sebagai berikut :

Tabel 1. Analisis Pembelajaran Tematik terintegrasi konsep kebencanaan di Sekolah Dasar

Kelas	Tema
Kelas I	1. Diriku 2. Kegemaranku 3. Kegiatanku 4. Keluargaku 5. Pengalamanku 6. Lingkungan Bersih, Sehat dan Asri 7. Benda, hewan dan tanaman disekitarku 8. Peristiwa alam

Kelas II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hidup Rukun 2. Bermain dilingkunganku 3. Tugasku sehari-hari 4. Hidup Bersih dan Sehat 5. Aku dan Sekolahku 6. Air, Bumi dan Matahari 7. Merawat Hewan dan Tumbuhan 8. Keselamatan di rumah dan di perjalanan
Kelas III	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup 2. Menyayangi tumbuhan dan hewan di sekitar 3. Benda di sekitarku 4. Hak dan Kewajibanku 5. Perubahan cuaca 6. Energi dan Perubahan 7. Perkembangan teknologi 8. Praja Muda Karana
Kelas IV	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indahya kebersamaan 2. Selalu berhemat energi 3. Peduli terhadap lingkungan hidup 4. Berbagai pekerjaan 5. Pahlawanku 6. Indahya Negeriku 7. Cita-citaku 8. Tempat tinggalku 9. Makanan sehat dan bergizi
Kelas V	<ol style="list-style-type: none"> 1. Organ Gerak Hewan dan Manusia 2. Udara Bersih 3. Makanan Sehat 4. Organ Peredaran Darah hewan dan manusia 5. Ekosistem 6. Kalor dan perpidahannya 7. Benda-benda disekitar 8. Peristiwa dalam kehidupan 9. Lingkungan sahabat kita

Kelas VI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selamatkan makhluk hidup 2. Persatuan dalam perbedaan 3. Tokoh dan penemuan 4. Globalisasi 5. Wiraswaha 6. Menuju masyarakat sehat 7. Kepemimpinan 8. Bumiku 9. Menjelajah angkasa luar
----------	---

Tematik SD Kurikulum 2013 Edisi Revisi 2017.

Berdasarkan tabel 1. dapat diketahui beberapa tema yang berpotensi untuk dikembangkan kedalam konsep kebencanaan berbasis kearifan lokal. Tema pilihan tersebut ditetapkan berdasarkan analisis konten, analisis sub tema, dan analisis potensi kearifan lokal terkait dengan konsep kebencanaan. Berikut rangkuman tema yang direkomendasikan untuk dikembangkan dan diintegrasikan ke materi kebencanaan berbasis kearifan lokal di sekolah Dasar. Kelas I, tema peristiwa alam. Kelas II, tema Keselamatan dirumah dan di perjalanan. Kelas III, tema Perubahan cuaca. Kelas IV, tema Peduli terhadap lingkungan hidup. Kelas V, tema Lingkungan sahabat kita. Kelas VI, tema Bumiku.

KESIMPULAN

Bencana adalah rangkaian peristiwa yang mengancam, dan mengganggu

kehidupan masyarakat, baik berupa bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Bencana merupakan interaksi antara bahaya, kerentanan dan kapasitas. *Bahaya* (ancaman) adalah Suatu kejadian alam atau peristiwa yang bisa menimbulkan potensi terjadinya kerugian harta benda, jiwa, psikologis dan lingkungan. *Kerentanan* adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrolis, klimatologis, geografis, social, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan untuk mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan menguyrangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu, dengan kata lain kerentanan merupakan Kekurangan dan kelemahan yang dimiliki sehingga mudah terkena bencana. *Kapasitas* merupakan penguasaan sumber daya, cara dan kekuatan yang dimiliki masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan dan mempersiapkan diri mencegah, menanggulangi, meredam dan dengan cepat memulihkan diri dari dampak yang ditimbulkan/diakibatkan oleh bencana. Dengan kata lain kapasitas merupakan Kemampuan dan kekuatan yang dimiliki untuk menghadapi bencana.

Tingkat risiko bencana akan tinggi, apabila ancaman dan kerentanannya juga tinggi sedangkan kapasitas yang dimiliki bernilai rendah/kecil. Oleh karena itu, Sekolah Dasar yang memiliki siswa yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana harus ditingkatkan kapasitasnya melalui pembelajaran kebencanaan yang terintegrasi dalam kurikulum 2013. Penelitian ini memiliki keterbatasan dimana hanya mendeskripsikan tematik yang sesuai dengan materi kebencanaan, tetapi masih membutuhkan tahap ujicoba pengembangan model konsep kebencanaan melalui tematik dalam implementasi kurikulum 2013. Selanjutnya penelitian ini, juga mencoba untuk menjabarkan tentang konsep pembelajaran kebencanaan berbasis kelas berdasarkan hasil kajian literatur, meskipun demikian dibutuhkan suatu penelitian eksperimen untuk tahap selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2019). Data dan Informasi Bencana Indonesia.
- Gowing, J. R., Walker, K. N., Elmer, S. L., & Cummings, E. A. (2017). Disaster preparedness among health professionals and support staff: what is effective? An integrative literature

- review. *Prehospital and Disaster Medicine*, 32(3), 321–328.
<https://doi.org/10.1017/S1049023X1700019X>
- Khan, M. S. A. (2008). Disaster preparedness for sustainable development in Bangladesh. *Disaster Prevention and Management: An International Journal*, 17(5), 662–671.
<https://doi.org/10.1108/09653560810918667>
- Rañeses, M. K., Chang-Richards, A., Richards, J., & Bubb, J. (2018). Measuring the level of disaster preparedness in Auckland. *Procedia Engineering*, 212(2017), 419–426.
<https://doi.org/10.1016/j.proeng.2018.01.054>
- Sinha, A., Pal, D. K., Kasar, P. K., Tiwari, R., & Sharma, A. (2008). Knowledge, attitude and practice of disaster preparedness and mitigation among medical students. *Disaster Prevention and Management: An International Journal*, 17(4), 503–507.
<https://doi.org/10.1108/09653560810901746>
- Tatebe, J., & Mutch, C. (2015). Perspectives on education, children and young people in disaster risk reduction. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 14, 108–114.
<https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2015.06.011>
- Tkachuck, M. A., Schulenberg, S. E., & Lair, E. C. (2018). Natural disaster preparedness in college students: Implications for institutions of higher learning. *Journal of American College Health*, 66(4), 269–279.
<https://doi.org/10.1080/07448481.2018.1431897>

Kebijakan

Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana

Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008 penyelenggaraan penanggulangan bencana

Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana

Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2008 tentang peran serta lembaga internasional

dan lembaga asing non pemerintah dalam penanggulangan bencana,

Perpres nomor 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana,

Surat edaran Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 70a /MPN/SE/2010 tentang pengarusutamaan Pengurangan Resiko Bencana di Sekolah

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor 4 tahun

2012 tentang Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana.

Permendikbud nomor 33 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (Program SPAB).